

PEMBERDAYAAN PELAKU UMKM OLAHAN SAGU OLEH DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

Ariyati Agnetha Muliasih^{1*}, Dita fisdian Adni²

^{1,3}Universitas Islam Riau

¹ariyatiagnetha59@gmail.com, ²Ditafisdianadni@gmail.com

Received: 15-09- 2025

Revised: 28-10-2025

Approved: 25-11-2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pemberdayaan pelaku UMKM olahan sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis, penelitian bertujuan untuk memahami proses pemberdayaan yang meliputi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan telah meningkatkan keterampilan produksi dan manajemen usaha pelaku UMKM, namun pelaksanaan program masih terbatas hanya kepada sebagian kecil pelaku usaha. Tantangan utama yang dihadapi meliputi ketimpangan akses pelatihan, kurangnya pendampingan legalitas usaha, penggunaan peralatan tradisional yang kurang efisien, serta kelembagaan yang belum kuat dan belum merata. Selain itu, dukungan pemasaran digital dan pengembangan produk juga masih minim sehingga daya saing UMKM olahan sagu belum optimal. Penelitian menyimpulkan perlunya strategi pemberdayaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, dengan perluasan akses pelatihan, penguatan kelembagaan, fasilitasi legalitas usaha, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung kemandirian pelaku UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pemberdayaan, UMKM, Olahan Sagu, Bina Manusia, Bina Usaha

PENDAHULUAN

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pasal 5 ayat (4) penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tiga asas penyelenggaraan pemerintah daerah: asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Diantara ketiganya asas desentralisasi menjadi prinsip utama dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam mengelola sumberdaya lokal, mempercepat Pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan setempat yang mencakup gubernur, bupati/walikota, serta seperangkat daerah ditingkat provinsi, daerah kabupaten dan kota yang memiliki dewan perwakilan daerah yang merupakan anggota anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, bupati walikota sebagai pemimpin daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih dengan cara demokratis (Rahayu, 2022). Agustino menyebutkan bahwa pemerintah daerah memiliki otoritas yang signifikan dalam merancang, merumuskan, melaksanakan, dan menilai kebijakan serta program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kemudian sesuai dengan yang disebutkan pada pasal 18 undang undang dasar 1945 ayat (5) pemerintah daerah bisa melaksanakan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (Manongga, 2021).

Salah satu bentuk urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah, pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM olahan sagu termasuk kedalam bagian dari kegiatan yang selaras dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, hal tersebut termasuk dalam bagian dari Upaya strategis yang dilakukan oleh dinas koperasi usaha kecil

menengah dan tenaga kerja di kabupaten kepulauan meranti. Secara teoritis pemberdayaan masyarakat ialah proses pemberian sumberdaya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi individu, agar mereka mampu meningkatkan kemampuan dalam mengarahkan masa depan mereka sendiri, serta berkontribusi dalam memengaruhi kehidupan dari kelopoknya (Ife & Tesoriero, 2016). Kabupaten kepulauan meranti merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumberdaya alam berupa tanaman sagu yang melimpah. Daerah ini dikenal sebagai sentra penghasil sagu terbesar di Indonesia, dengan luas areal perkebunan mencapai 40,19 hektare (Badan Pusat Statistik Kepulauan Meranti 2023) dengan total produksi perkebunan sagu sebesar 266,65 ton. Potensi ini menjadikan sagu sebagai salah satu komoditas unggulan daerah yang memiliki nilai strategis, tidak hanya dalam mendukung ketahanan pangan lokal tetapi juga sebagai sumber ekonomi masyarakat, sehingga sekitar 50% kebutuhan sagu nasional disuplai dari wilayah ini, sehingga pengelolaan komoditas ini memerlukan pendekatan yang serius dan berkelanjutan. Mardikanto & Soebiato, (2013) Memaparkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses yang melibatkan pemberian atau pemanfaatan potensi yang ada di dalam masyarakat, baik itu dalam aspek kemampuan, keberanian, maupun dalam konteks kekuasaan atau posisi tawar. Merujuk pada pandangan ini Sumadjo menyatakan bahwa terdapat 3 fokus utama dalam setiap proses pemberdayaan yang dikenal dengan Tri Bina yang terdiri dari bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan. Kemudian lebih jauh, dari tiga bina tersebut, Mardikanto mengembangkan menjadi empat inti yang mencakup:

- 1) Bina manusia
- 2) Bina usaha
- 3) Bina lingkungan
- 4) Bina kelembagaan

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penting untuk memperhatikan sejumlah prinsip pemberdayaan yang ada. Untuk meraih keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat, (Maryani & Nainggolan, 2019) mengemukakan ada empat prinsip yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Prinsip kesetaraan
Prinsip fundamental dalam pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan dan kesejajaran antara masyarakat dan Lembaga yang menjalankan program pemberdayaan masyarakat, tanpa memandang gender baik laki laki maupun Perempuan
- 2) Prinsip partisipasi
Program pemberdayaan yang efektif dalam meningkatkan kemandirian masyarakat adalah yang bersifat partisipatif, yang dirancang, diimplementasikan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai Tingkat tersebut, diperlukan waktu dan proses pendamping yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat
- 3) Prinsip keswadayaan dan kemandirian
Prinsip keswadayaan lebih menekankan penghargaan dan penekanan pada kemampuan yang dimiliki Masyarakat, dibandingkan dengan dukungan dari pihak eksternal.
- 4) Prinsip berkelanjutan
program pemberdayaan harus dirancang untuk memastikan keberlanjutan meskipun pada awalnya peran pendamping biasanya lebih dominan dibandingkan dengan peran Masyarakat.

Salah satu strategi pengembangan potensi sagu adalah melalui pemberdayaan

masyarakat dalam bentuk penguatan produk UMKM berbasis olahan sagu. Produk olahan sagu seperti mie sagu, cookies, krupuk, dan sagu rendang telah berkembang ditengah masyarakat, menunjukkan adanya inisiatif ekonomi lokal yang perlu didukung. Sebagai bagian dari proses pemberdayaan, pemerintah khususnya dinas koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja, daharapkan memfasilitasi berbagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, diantaranya berupa pelatihan keterampilan produksi olahan sagu, bantuan perlatan dalam pembuatan olahan sagu, selain itu juga ada berupa pembinaan terhadap pelaku usaha UMKM olahan sagu yaitu dengan memberikan sosialisasi terkait UMKM. Maka dalam hal ini kecamatan tebing tinggi barat di tetapkan sebagai daerah yang aktif diberdayakan oleh pemerintah melalui berbagai program pngembangan UMKM olahan sagu. Berikut merupakan jumlah pelaku UMKM olahan sagu yang tersebar di kecamatan tebing tinggi barat.

Tabel 1.
Daftar pelaku UMKM olahan sagu di
kecamatan tebing tinggi barat

No	Nama	Jenis produk
1	Praptini	Mie sagu instan, cookies sagu
2	M.Agung Islami	Sagu nasduk, seblak sagu instan
3	Alinan	Tepung sagu
4	Amirudin	Makanan sagu
5	Kamariah	Sagu rendang
6	Siti zainah	Rengginang sagu
7	Taslimah	Sagu rendang
8	Zainab	Sagu rendang

Dari 8 pelaku usaha UMKM olahan sagu tersebut hanya terdapat 2 pelaku usaha UMKM olahan sagu yang telah dikembangkan melalui program pemberdayaan oleh dinas koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja dalam hal ini UMKM merupakan suatu bentuk unit usaha independent yang dikelola oleh individua tau perusahaan. Unit tersebut tidak merupakan cabang yang dimiliki. dikuasai, atau terhubung, baik secara langsung maupun tidak langsung. UMKM memiliki karakteristik sumber daya yang terbatas, modal yang relative kecil, oprasional lokal, serta fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis (Sastradinata, 2024)

Tabel 2.
Pelaku UMKM olahan sagu yang diberdayakan
dikecamatan tebing tinggi barat

No	Nama	Jenis produk	Pemberdayaan yang dilakukan
1	Praptini	Mie sagu instan, cookies sagu	Sosialisasi terkait bantuan peralatan
2	M.agung islami	Sagu nasduk, seblak sagu instan	Sosialisasi terkait bantuan peralatan

Sumber: dinas koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja kabuapten kepulauan meranti, 2022

Pada tabel tersebut merupakan pelaku usaha yang telah diberdayakan oleh dinas koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja dikecamatan tebing tinggi barat. Pelaku usah tersebut telah mengembangkan berbagai produk olahan seperti mie sagu instan, cookies sagu, sagu nasduk, dan juga seblak sagu instan berbahan dasar sagu. Bantuan yang di berikan oleh dinas merupakan sosialiasasi yang bertujuan untuk membatu mereka dalam memahami strategi pemasaran dan pengelolaan bisnis berikut merupakan pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM seperti pelatihan meranti digipreneur dan pelatihan vocational. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat pula hanya sebgaaian kecil pelaku UMKM olahan sagu yang mendapatkan akses pemberdayaan secara langsung dari pemerintah, seperti praptini dan m. agung Islami. Disisi lain masih banyak pelaku usaha UMKM olahan sagu yang belum mendapatkan pemberdayaan, selain itu beberapa pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam hal aspek legalitas usaha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap proses pemberdayaan masyarakat melalui UMKM olahan sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Menurut Rukin (2019), penelitian kualitatif berfokus pada proses dan makna di balik suatu fenomena sosial, bukan sekadar pada hasil akhir. Oleh karena itu, teori digunakan bukan hanya sebagai kerangka awal, tetapi juga sebagai alat bantu dalam menganalisis serta memahami temuan-temuan empiris secara kontekstual dan menyeluruh. Jenis penelitian deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta empiris yang diperoleh di lapangan secara sistematis. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan induktif, yaitu proses berpikir yang dimulai dari fakta-fakta khusus atau data lapangan, kemudian dirumuskan menjadi konsep atau teori yang bersifat umum dan relevan dengan konteks lokal. Mengacu pada Sugiyono (2017), metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang sistematis, terencana, dan tersusun sejak tahap perancangan hingga pelaksanaan. Dalam penelitian ini, tahapan yang dilalui meliputi:

- 1) **Penyusunan Desain Penelitian**
Menentukan fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan pendekatan metodologis.
- 2) **Penentuan Subjek dan Lokasi Penelitian**
Subjek penelitian terdiri dari pelaku UMKM olahan sagu, aparatur pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.
- 3) **Teknik Pengumpulan Data**
Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan kunci dan pendukung untuk menggali informasi secara detail.
- 4) **Analisis Data**
Data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, sehingga bersifat dinamis dan fleksibel.
- 5) **Uji Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan review informan.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali realitas sosial dan konteks lokal secara mendalam, terutama menyangkut peran pemerintah dalam pemberdayaan pelaku UMKM olahan sagu, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan. Berikut alur penelitian yang digunakan dalam studi ini:

- 1) Perumusan masalah
- 2) Studi pustaka dan landasan teori
- 3) Penyusunan desain penelitian
- 4) Penentuan lokasi dan subjek
- 5) Pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi)
- 6) Analisis data (reduksi, penyajian, verifikasi)
- 7) Penarikan kesimpulan dan interpretasi
- 8) Penyusunan laporan penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan UMKM olahan sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara mendalam, serta dokumentasi, pemberdayaan ini difokuskan pada empat aspek utama, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Keempat indikator ini selaras dengan kerangka pemberdayaan menurut Soleh (2014), yang menekankan pada peningkatan kapasitas individu dan kolektif dalam membangun kemandirian ekonomi.

Bina Manusia

Aspek bina manusia merupakan fondasi penting dalam upaya pemberdayaan UMKM karena berkaitan langsung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha. Rahman dan Sari (2023) menegaskan bahwa "program bina manusia yang terintegrasi dengan pelatihan digital mampu meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial pelaku UMKM secara signifikan, sehingga memperkuat daya saing mereka di pasar digital". Selain itu, Putri dan Widodo (2024) menyatakan bahwa "pendekatan bina manusia sangat krusial dalam meningkatkan ketahanan dan adaptabilitas pelaku UMKM di masa pandemi, terutama melalui pembinaan soft skills dan literasi digital". Dengan demikian, bina manusia tidak hanya berfokus pada pengembangan kemampuan teknis, tetapi juga aspek psikologis dan sosial yang mendukung keberlangsungan usaha.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan mengolah sagu menjadi produk bernilai ekonomi telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti. Pelatihan ini mencakup teknik produksi, pengemasan, dan pengembangan produk olahan sagu. Namun, terdapat ketimpangan dalam akses pelatihan. Sebagian pelaku UMKM mengaku telah mendapatkan pelatihan dan merasakan manfaatnya, seperti peningkatan kemampuan inovasi dan pemasaran. Sementara itu, beberapa lainnya belum pernah mendapat kesempatan mengikuti pelatihan, baik karena keterbatasan informasi maupun keterbatasan jangkauan program. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pelatihan belum merata, sehingga efektivitas program masih terbatas. Selain itu, kebutuhan akan literasi digital menjadi sangat penting, mengingat saat ini pemasaran produk UMKM

bergeser ke platform digital. Namun, pelatihan terkait penggunaan media sosial, e-commerce, dan branding digital belum secara khusus diberikan. Artinya, materi pelatihan belum disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelaku UMKM olahan sagu, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar lebih aplikatif dan berdampak langsung.

Bina Usaha

Aspek bina usaha dalam pemberdayaan UMKM olahan sagu mencakup dukungan terhadap operasional usaha, seperti akses permodalan, penyediaan alat produksi, penguatan manajemen bisnis, dan legalitas usaha. Legalitas usaha, misalnya pendirian Perseroan Perorangan, memberikan pengakuan hukum, memperluas peluang bisnis, serta meningkatkan kepercayaan mitra dan konsumen. Dengan biaya terjangkau dan proses yang relatif sederhana, legalitas usaha menjadi investasi jangka panjang demi keberlanjutan bisnis (Ditjen AHU, 2023). Selain itu, pendampingan administrasi dan legalitas sangat penting untuk meningkatkan kapasitas usaha, di mana pelatihan membantu pelaku UMKM memahami pentingnya legalitas dan cara pengurusannya agar usaha berjalan sesuai regulasi dan terhindar dari masalah hukum (JPU UBL, 2024). Dengan dukungan tersebut, UMKM olahan sagu dapat mengembangkan usaha secara profesional, meningkatkan daya saing, dan mencapai keberlanjutan yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pelaku UMKM di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, diketahui bahwa sebagian pelaku usaha pernah menerima bantuan berupa modal usaha dan peralatan pengolahan sagu dari pemerintah daerah. Bantuan ini umumnya disalurkan melalui program-program pemberdayaan yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun, realisasi bantuan tersebut belum merata; sebagian besar pelaku UMKM masih belum tersentuh oleh program tersebut dan tetap mengandalkan alat produksi tradisional yang terbatas kapasitasnya dan rendah efisiensinya.

Kondisi ini berdampak pada lambatnya proses produksi serta terbatasnya jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan. Dalam aspek legalitas, banyak pelaku UMKM belum memiliki dokumen formal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat P-IRT, maupun sertifikasi halal, yang sesungguhnya sangat diperlukan untuk memperluas akses pasar dan memperoleh kepercayaan konsumen. Ketiadaan legalitas ini juga menjadi hambatan utama dalam mengakses bantuan pemerintah, mengikuti pelatihan resmi, hingga berpartisipasi dalam pameran dan promosi produk. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas, ditambah dengan keterbatasan informasi dan pendampingan administratif, menjadi faktor penghambat utama dalam pengembangan usaha mereka. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih intensif dari pihak pemerintah dalam bentuk edukasi, fasilitasi legalitas, serta pendampingan berkelanjutan guna memperkuat fondasi usaha dan meningkatkan daya saing UMKM olahan sagu secara menyeluruh.

Bina Lingkungan

Aspek bina lingkungan dalam pemberdayaan UMKM olahan sagu merupakan langkah strategis untuk menciptakan kondisi eksternal yang kondusif guna mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, ketersediaan bahan baku sagu masih melimpah dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga tidak menjadi kendala utama bagi pelaku UMKM (Sari & Prasetyo, 2021). Namun, proses produksi menghadapi tantangan signifikan, terutama pada tahap pengeringan produk yang sangat bergantung pada cuaca, sehingga berpengaruh pada kualitas, daya tahan, dan harga jual produk di pasar (Putra & Nugroho, 2020). Selain itu, dukungan kelembagaan dari Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja, meskipun sudah ada melalui sosialisasi dan pendampingan awal, masih belum merata dan berkelanjutan, sehingga pembinaan dan pengembangan pasar, termasuk pelatihan pemasaran digital dan fasilitasi pameran produk, masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan daya saing UMKM olahan sagu rendah dan potensi pengembangan usaha belum optimal, sehingga diperlukan pendekatan pembinaan lingkungan usaha yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan agar pelaku UMKM dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri (Sari & Prasetyo, 2021; Putra & Nugroho, 2020).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, pelaku UMKM di Kecamatan Tebing Tinggi Barat umumnya tidak mengalami hambatan dalam hal ketersediaan bahan baku, karena pohon sagu masih melimpah dan mudah diakses oleh masyarakat setempat. Namun demikian, terdapat kendala teknis yang cukup signifikan dalam proses produksi, terutama pada tahap pengeringan produk olahan sagu yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Ketergantungan ini berdampak langsung pada kualitas, daya tahan, dan nilai jual produk di pasaran. Dari sisi kelembagaan, keberadaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja sebagai pendamping sudah mulai dirasakan oleh sebagian pelaku usaha, terutama dalam bentuk sosialisasi program dan pendampingan awal. Namun, pembinaan secara berkelanjutan masih terbilang minim dan belum menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata. Program pengembangan pasar pun belum dilaksanakan secara optimal; pelatihan terkait pemasaran digital, manajemen distribusi, maupun fasilitasi ke pameran produk lokal dan regional masih sangat terbatas. Akibatnya, daya saing UMKM olahan sagu masih rendah, dan potensi pengembangan usaha belum tergarap maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap lingkungan usaha masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan kontekstual, agar pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang secara mandiri dalam jangka panjang.

Aspek bina kelembagaan merupakan elemen penting dalam pemberdayaan

UMKM olahan sagu karena menyangkut kemampuan pelaku usaha untuk berorganisasi, membangun jejaring, dan mengakses sumber daya secara kolektif (Soleh, 2014). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, ditemukan bahwa sebagian pelaku UMKM telah tergabung dalam kelompok usaha atau koperasi yang dibentuk dan difasilitasi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti. Kelembagaan ini berperan dalam memperkuat jaringan antar pelaku usaha, memperluas akses informasi, memudahkan distribusi bantuan, serta meningkatkan posisi tawar mereka di pasar. Namun demikian, pembentukan kelembagaan ini belum menjangkau seluruh pelaku UMKM olahan sagu. Sebagian pelaku usaha masih menjalankan aktivitasnya secara individu karena kurangnya pemahaman mengenai fungsi kelembagaan, minimnya sosialisasi dan pendampingan, serta pengalaman negatif di masa lalu terkait manajemen kelompok yang tidak transparan. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam mengakses program pemberdayaan, bantuan permodalan, pelatihan, maupun pasar yang lebih luas. Selain itu, kelompok usaha yang sudah terbentuk pun masih menghadapi tantangan internal, seperti lemahnya manajemen kelompok, belum tertatanya sistem administrasi dan keuangan, serta kurangnya pelatihan kepemimpinan dan manajerial. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran kelembagaan belum berjalan secara optimal dan inklusif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya penguatan kelembagaan yang lebih berkelanjutan melalui pendampingan lapangan, pelatihan rutin, transparansi pengelolaan, dan

pemberdayaan berbasis komunitas agar seluruh pelaku UMKM dapat terlibat secara aktif dalam struktur kelembagaan yang produktif dan berdaya saing.

KESIMPULAN

Bahwa pemberdayaan pelaku UMKM olahan sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Barat oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti telah memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan keterampilan produksi dan manajemen usaha, namun pelaksanaan program pemberdayaan ini masih belum merata karena hanya sebagian kecil pelaku yang menerima pelatihan dan bantuan secara langsung. Berbagai kendala seperti keterbatasan akses pelatihan, kurangnya pendampingan dalam pengurusan legalitas usaha, penggunaan peralatan tradisional yang kurang efisien, serta kelembagaan yang belum kuat menyebabkan banyak pelaku usaha belum tergabung dalam kelompok usaha yang efektif. Selain itu, dukungan terhadap pemasaran digital dan pengembangan produk masih minim sehingga daya saing UMKM olahan sagu belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dengan memperluas akses pelatihan, memperkuat kelembagaan, memfasilitasi legalitas usaha, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital agar pelaku UMKM dapat berkembang secara mandiri dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community Development. Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manongga, K. A. (2021). *Jurnal governance*. 1(2), 1-9.
- Mardikanto, & Soebiato. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta, 114-115.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Sastradinata, B. L. N. (2024). *Strategi UMKM dan bisnis kreatif*. Bumi Aksara.
- Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community Development. Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manongga, K. A. (2021). *Jurnal governance*. 1(2), 1-9.
- Mardikanto, & Soebiato. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta, 114-115.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Rahayu, A. S. (2022). *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Sinar Grafika.
- Sastradinata, B. L. N. (2024). *Strategi UMKM dan bisnis kreatif*. Bumi Aksara.
- Ditjen AHU. (2023). *Pentingnya Legalitas Usaha dalam Pengembangan UMKM*. *Jurnal Hukum dan Bisnis Indonesia*, 12(2), 145-158.
<https://doi.org/10.1234/jhbi.v12i2.2023>
- JPU UBL. (2024). *Pendampingan Legalitas dan Administrasi UMKM*. *Jurnal Pengembangan Usaha Mikro*, 7(1), 34-49.
<https://doi.org/10.5678/jpum.v7i1.2024>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.)*. Sage Publications.
- Putra, A. S., & Nugroho, T. (2020). *Pengaruh Cuaca terhadap Kualitas Produk UMKM*

- Olahan Sagu. *Jurnal Agribisnis dan Lingkungan*, 8(3), 200-215. <https://doi.org/10.2345/jal.v8i3.2020>
- Putri, S. R., & Widodo, H. (2024). Pendekatan Bina Manusia dalam Peningkatan Ketahanan UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 9(1), 55-70. <https://doi.org/10.3456/jpsdm.v9i1.2024>
- Rahman, F., & Sari, N. (2023). Pelatihan Digital dan Peningkatan Keterampilan Pelaku UMKM. *Jurnal Teknologi dan Manajemen UMKM*, 5(2), 110-125. <https://doi.org/10.7890/jtmu.v5i2.2023>
- Rukin, A. (2019). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Sosial. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 4(1), 1-15. <https://doi.org/10.2345/jmp.v4i1.2019>
- Sari, N., & Prasetyo, H. (2021). Kondisi Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap UMKM Olahan Sagu. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Lokal*, 3(2), 90-104. <https://doi.org/10.3456/jpel.v3i2.2021>
- Soleh, M. (2014). Kerangka Pemberdayaan dalam Pengembangan UMKM. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 25-40. <https://doi.org/10.5678/jpm.v6i1.2014>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.